



# RENCANA KERJA

# DINAS PERTANIAN

# TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
DINAS PERTANIAN**

**Komplek Perkantoran Cimaja Jl Raya Cisolok Km 10  
Telp (0266) 436407-436408 Cisolok Palabuhanratu-Sukabumi**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021.

Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, dan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan visi misi Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan pembangunan di bidang pertanian.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021, dapat disusun dan menjadi pedoman serta acuan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2021.

Sukabumi, Januari 2021

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Sukabumi,



**Ir. H. SUDRAJAT, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620422 198803 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BABI PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI	
TAHUN 2020	
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.....	5
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian.....	7
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian..	8
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	11
BABIII TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian.....	15
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian .....	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN	
4.1. Visi Dan Misi Kabupaten Sukabumi .....	19
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian .....	28
BAB V PENUTUP .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang tertuang di dalam dokumen perencanaan, diantaranya RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi diselaraskan dengan rencana pembangunan pertanian Nasional dan rencana pembangunan pertanian di Jawa Barat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi adalah Dokumen Perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2021 dan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi yang sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD Dinas Pertanian, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi periode 2016 – 2021.

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani dan kebun, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perkebunan. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk

mencapai peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi non pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016– 2021.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 90 tahun 2019 tentang Klasikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
11. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 mencakup Kebijakan, Program beserta indikator kinerjanya dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, beserta pendanaannya dengan mengacu

kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 adalah :

- a. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi yang memuat arah kebijakan teknis dan kegiatan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sukabumi.
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2021.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Renstra Dinas dengan Renja Tahun 2021, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian selama 1 (Satu) Tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2021 yaitu tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 disusun sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN LALU
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
		2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian
		2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
		2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN
		3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
		3.2. Tujuan dan sasaran Rancangan awal Dinas Pertanian
		3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN
		4.1. Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi
		4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian
BAB V	:	PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**BELANJA**

Belanja yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020

**1. Evaluasi Belanja Tahun Anggaran 2020**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	60.000.000	60.000.000	100,00
2	Belanja Tidak Langsung	22.385.906.331	22.307.591.940	99,65
3	Belanja langsung	23.577.114.650	17.564.076.000	74,50
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>46.023.020.981</b>	<b>39.931.667.940</b>	<b>87,76</b>

**2. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020**

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.187.646.000,00	2.157.790.075,00	98,64
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.745.715.000,00	1.715.859.075,00	98,29
Pelayanan Administrasi Aset	22.416.000,00	22.416.000,00	100,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian	17.360.000,00	17.360.000,00	100,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis Balai Penyuluh	27.635.000,00	27.635.000,00	100,00

<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>%</b>
Pertanian			
Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah Sukabumi	39.590.000,00	39.590.000,00	100,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah Cibadak	35.740.000,00	35.740.000,00	100,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah Cicurug	34.820.000,00	34.820.000,00	100,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah palabuhanratu	108.375.000,00	108.375.000,00	100,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah Jampangtengah	36.130.000,00	36.130.000,00	100,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah Jampangkulon	87.970.000,00	87.970.000,00	100,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah Sagaranten	31.895.000,00	31.895.000,00	100,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>799.767.250,00</b>	<b>792.746.500,00</b>	<b>99,12</b>
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.168.000,00	153.168.000,00	100,00
Pengadaan Perangkat Komputer	40.000.000,00	39.655.000,00	99,14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	145.250.000,00	144.591.000,00	99,55
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	325.833.400,00	319.816.650,00	98,15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Pembangunan Pagar Kantor	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	37.425.850,00	37.425.850,00	100,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	94.090.000,00	94.090.000,00	100,00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>155.308.400,00</b>	<b>155.308.400,00</b>	<b>100,00</b>

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	24.408.400,00	24.408.400,00	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	30.167.000,00	30.167.000,00	100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.125.000,00	59.125.000,00	100,00
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	-	-	-
Perencanaan Pembangunan Pertanian	41.608.000,00	41.608.000,00	100,00
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>1.397.765.500,00</b>	<b>1.397.665.500,00</b>	<b>99,99</b>
Pengembangan Kawasan Sayuran	167.490.000,00	167.490.000,00	100,00
Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olahan Padi, Palawija dan Hortikultura	42.618.000,00	42.618.000,00	100,00
Penguatan Kompetensi Manajemen Kelembagaan dan Aksesibilitas Permodalan Usaha Perkebunan	14.988.000,00	14.988.000,00	100,00
Pengembangan Kawasan Biofarmaka	16.545.000,00	16.545.000,00	100,00
Pengembangan Kawasan Buah-Buahan	362.810.000,00	362.810.000,00	100,00
Pengembangan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian	10.190.000,00	10.190.000,00	100,00
Pengembangan Kawasan Florikultura	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Perkebunan	325.231.500,00	325.231.500,00	100,00
Pengelolaan Ketenagaan Penyuluh (PKP)	262.810.000,00	262.810.000,00	100,00
Pelayanan Penyuluhan Pertanian	161.273.000,00	161.173.000,00	99,94
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	9.240.000,00	9.240.000,00	100,00
<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian</b>	<b>19.036.627.500,00</b>	<b>13.060.565.525,00</b>	<b>68,61</b>
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian (DAK Penugasan Tahun 2020)	1.617.500.000,00	1.446.140.000,00	89,41
<i>Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program</i>	1.584.082.000,00	1.448.214.800,00	91,42

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
<i>(IPDMIP)</i>			
Intensifikasi Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
Kemitraan Usaha Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan	30.220.000,00	30.220.000,00	100,00
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	7.360.000,00	7.360.000,00	100,00
Optimalisasi Balai Benih Induk Padi Sawah	83.365.000,00	83.365.000,00	100,00
Optimalisasi Kebun Dinas	101.750.000,00	101.750.000,00	100,00
Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar	30.040.000,00	30.040.000,00	100,00
Pengelolaan Data Statistik Pertanian	87.150.000,00	87.150.000,00	100,00
Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan	258.640.500,00	258.640.500,00	100,00
Pengembangan Infrastruktur Pertanian	13.992.700.000,00	8.353.096.000,00	59,70
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	63.930.000,00	63.930.000,00	100,00
Peningkatan Produksi melalui Prasarana dan Sarana Pertanian	908.690.000,00	906.563.665,00	99,77
<i>Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP Pendampingan)</i>	62.760.000,00	37.748.560,00	60,15
Pengembangan infrastruktur pertanian (DID Tambahan Tahun 2020)	200.000.000,00	197.907.000,00	98,95
<b>JUMLAH</b>	<b>23.577.114.650,00</b>	<b>17.564.076.000,00</b>	<b>74,50</b>

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategik Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian dan sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, capaian realisasi keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 sebesar 74,50 %.

Ada 39 (tiga puluh sembilan) paket pekerjaan kontraktual yang tidak terbayarkan dari kegiatan pembangunan infrastruktur (jaringan irigasi) dan pemeliharaan jaringan internet sebesar Rp.5.639.923.157,32,- atau 23,92%. Pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan seratus persen (100%) sehingga realisasi capaian fisik menjadi 98,41%, keterlambatan pembayaran dikarenakan dana kas daerah kosong dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2021.

Secara rinci pencapaian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

### 1. Terciptanya Kesempatan Kerja Sektor Agribisnis

Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian	Orang	200	315	157,5
2. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perkebunan	Orang	122.850	95.137	77,44

### 2. Meningkatnya Produksi Pangan

Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian Peningkatan Produksi (%)
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian :	Ton	906.626	931.334	2,65
1. Padi	Ton	137.350	175.864	21,90
2. Jagung	Ton	7.246	28.496	74,57
3. Kedelai	Ton	110.463	119.117	7,27
4. Ubi Kayu	Ton	27.495	23.497	17,01
5. Cabe	Ton	455	608	25,16
6. Bawang Merah	Ton	16.016	14.445	-10,88
7. Tomat	Ton	4.155	1.871	-122,07
8. Manggis	Ton	20.723	10.996	-88,46
9. Pepaya	Ton	115.340	105.454	-9,37
10. Pisang	Ton	10.065,93	16.037	37,23
11. Teh	Ton	1.692,76	1.947,70	13,09
12. Cengkeh	Ton	332,60	387,02	14,,06
13. Pala	Ton	139.013,5	245.821,77	43,45
14. Kepala	Ton	0	185,84	98,01
15. Kopi		3,69		
Jumlah		1.496.977,48	1.676.061,55	5,97

Capaian peningkatan produksi pangan secara kumulatif sebesar 5,97 %, jauh melebihi dari target yaitu 2%, tetapi ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada komoditas tomat, manggis pepaya dan pisang, hal ini disebabkan kondisi alam. Pada Tahun 2020 musim hujan yang sangat

panjang sehingga proses pembuahan tidak maksimal untuk tanaman manggis dan pisang, dengan curah hujan yang sangat tinggi dapat memicu serangan jamur pada tomat dan pepaya.

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Renstra tidak terlepas dari dukungan dana, ketersediaan tenaga teknis dan non teknis, serta sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut lebih banyak disebabkan karena lemahnya koordinasi dan pemahaman yang berbeda pada berbagai tingkatan. Faktor alam (non teknis) sangat berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura serta terhadap target peningkatan indeks pertanaman.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian**

Pembangunan di dalam pelaksanaannya akan menemui permasalahan – permasalahan sbb :

#### **a. Gejala penyempitan dan penguasaan lahan**

Kebutuhan pangan dari tahun ke tahun akan terus meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi disisi lain penguasaan petani umumnya sampai dengan saat ini semakin sempit yaitu kurang dari 0,5 Ha, hal ini akan menyebabkan kurang sejahteranya petani yang mungkin akan terjadi kemiskinan struktural.

#### **b. Proses pasca panen**

Umumnya hasil produksi (bahan baku pangan) tidak diperhatikan, padahal apabila diperhatikan akan memberikan nilai tambah. Proses pasca panen merupakan rantai lanjutan kegiatan pemasaran produk yang harus didukung sarana prasarana atau infrastruktur.

#### **c. Pelaksanaan otonomi daerah**

Otonomi daerah sebagai salah satu ikhtisar untuk mempercepat pemerataan pembangunan karena didesentralisasikan kewenangannya kepada daerah tetapi nampaknya daerah kurang memperhatikan yaitu dipisahkan kewenangan bahkan dihilangkan tugas, pokok dan fungsinya selain itu juga kurangnya dukungan anggaran.

#### **d. Fasilitas permodalan**

Selain kesulitan memperluas lahan dan peningkatan penggunaan teknologi juga mengakses permodalan. Seperti sektor bisnis yang lain selayaknyalah

sektor pertanian mendapatkan fasilitas pembiayaan yang memadai dengan proses yang cepat dan mudah.

**e. Perubahan iklim global dan lingkungan hidup**

Perubahan iklim global dan perubahan kondisi lingkungan hidup menyebabkan El-Nino yaitu menyebabkan terjadinya kemarau yang panjang sehingga produksi pertanian turun, bahkan mungkin kebakaran atau puso. Selain El-Nino, mungkin juga La-Nina yaitu menyebabkan terjadinya banjir. Perubahan dari El-Nino ke La-Nina akan menyebabkan perkembangbiakan hama penyakit tanaman.

**f. Jumlah penduduk dan proporsi jumlah penduduk**

Penduduk jumlahnya akan terus meningkat sejalan dengan turunnya tingkat kematian bayi dan penduduk usia lanjut, hal ini konsekwensinya akan terjadi perubahan jumlah konsumsi hasil pertanian akan meningkat pula.

Proporsi jumlah penduduk berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas akan meningkat sejalan dengan itu proporsi tenaga kerja yang terlibat akan bertambah juga, yang akhirnya tingkat pendapatan bertambah naik maka akan cenderung membeli produk yang mempunyai nilai utilitas lebih tinggi (cita rasa, segi bentuk, gizi, keamanan, ukuran, keindahan, kemudahan penggunaan dan tahan simpan).

**g. Globalisasi ekonomi**

Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang menimbulkan krisis ekonomi secara luas, akibat dampak wabah *covid-19*, segala aktivitas sangat terbatas, penjualan barang dan jasa ekspor pun turun drastis, untuk itu hendaknya sektor pertanian harus dijadikan sebagai sektor primadona dan bukan sektor penunjang.

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi wajib menerapkan prinsip – prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada

Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain : forum musyawarah koordinasi perencanaan seperti : MUSRENBANGPUS di tingkat Pusat, MUSRENBANGPROP di tingkat Propinsi, MUSRENBANGDA di tingkat Kabupaten/Kota, MUSRENBANG Kecamatan, MUSRENBANG tingkat Desa dan MUSRENBANGNAS di tingkat Daerah, forum – forum lintas pelaku, dan konsultasi publik.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas – luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang – undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program – program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan;

Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum – forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing – masing; Pada akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya;

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil

pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Sukabumi harus terus ditingkatkan. Melalui MUSRENBANG Tingkat Kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2021 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat propinsi dan Pusat.

Berdasarkan Data hasil Usulan Masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2021. Kegiatan – kegiatan yang diusulkan mengarah pada 2 program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

#### **B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

#### **C. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Penyediaan bahan logistic kantor
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

**D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

**E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

**F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peroraaan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

❖ **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

**A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian

❖ **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

**A. Pengembangan Prasarana Pertanian**

1. Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B
2. Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B
3. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya

**B. Pembangunan Sarana Pertanian**

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit
4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya (DAK Fisik)

❖ **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**

**A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian

**❖ PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

**A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara hirarki, rumusan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal yang digali dari berbagai potensi dan masalah spesifik lokal. Dengan demikian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan, walaupun bersifat otonom, namun masih bersifat komplementer, suplementer, dan integratif.

Atas dasar konsepsi dimaksud maka penetapan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal Kabupaten Sukabumi.

Rincian mengenai rencana kerja tersebut yang mencakup sasaran strategis, program, indikator kinerja dan target Dinas Pertanian Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	2 %
2.	Terciptanya Kesempatan Kerja di Sektor Agribisnis	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Sektor Agribisnis	2 %

##### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian selama 1 (satu) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian yaitu tersusunnya sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan pertanian selama 1 (satu) tahun.

##### 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian

Program di Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 adalah  
1). Program Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, 2).

Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian, 3). Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4). Program Prizinan Usaha Pertanian dan 5). Program Penyuluhan Pertanian.

Tema pembangunan sektor pertanian pada Tahun 2021 yaitu :  
**“Pembangunan ekonomi berbasis kawasan”**.

Untuk agenda prioritas pembangunan pertanian yang pertama dilaksanakan dengan rencana tindak berupa :

1. Mengembangkan pertanian yang berbasis kawasan
2. Membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencetak wirausahawan baru dan santri wirausaha berbasis agribisnis, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif
3. Mendorong usaha pertanian menjadi usaha agribisnis berbasis sentra/wilayah/ kawasan
4. Membentuk Pusat Promosi Hasil Pertanian
5. Penerapan Teknologi Pertanian tepat guna dan peningkatan SDM pelaku pertanian dan memaksimalkan peran fungsi koperasi pertanian

**Program dan Kegiatan sesuai Agenda Prioritas Pertama :**

**❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

**B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

**C. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Penyediaan bahan logistic kantor
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

**D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

**E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

**F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peroraaan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

❖ **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

**A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian

❖ **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

**A. Pengembangan Prasarana Pertanian**

1. Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B
2. Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B
3. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya

**B. Pembangunan Sarana Pertanian**

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit
4. Pembangunan, reabilitasasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya (DAK Fisik)

❖ **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**

**A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian

❖ **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

**A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN**

#### **4.1. Visi Dan Misi Kabupaten Sukabumi**

Memasuki periode pembangunan jangka menengah Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukabumi yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”**

Dalam membantu dalam pencapaian misi tersebut Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan empat misi antara lain :

- 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;**
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;**
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan**
- 4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Dalam hal ini Dinas Pertanian menyumbang kontribusi dalam pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang tercantum dalam misi 1 (satu) yaitu :

**1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian;
2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan;
3. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta melindungi hak-hak pekerja
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi local;
7. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;
8. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
9. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
10. Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Kepada Masyarakat;
11. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing;
12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian.

Berdasarkan tujuan pembangunan diatas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian adalah tujuan pertama yaitu :

**“Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian”.**

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mewujudkan ketahanan pangan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah, perlu adanya suatu upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui pengembangan agribisnis yang merupakan salah satu alternatif pengembangan nilai tambah industri pengolahan dan sektor pertanian serta memperkuat sistem lembaga keuangan bagi usaha tani. Sebagai daerah yang memiliki berbagai produk unggulan pertanian, Kabupaten Sukabumi layak untuk mengembangkan

dan memberdayakan setiap subsektor pertanian yang kompeten untuk menjadi basis peningkatan perekonomian masyarakat utamanya petani.

Guna meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian, maka sasaran pembangunan Dinas Pertanian yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya produksi pertanian
- b. Terciptanya kesempatan kerja di sektor agribisnis
- c. Terwujudnya sentra produksi pertanian
- d. Meningkatnya penyuluhan pertanian

Dalam melihat keterkaitan dan hierarki visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi periode pembangunan 2016-2021 yang berkaitan dengan Tupoksi dari Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 Bagi Dinas Pertanian

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri</b>				
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>
Misi 1 Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan	Membangun Budaya Organisasi Pemerintahan Yang Bersih, Peduli dan Profesional	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas birokrasi	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar
		Tingkat disiplin Aratur		
	Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis, lembaga keuangan pertanian	Jumlah produksi Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian
		Kesempatan Kerja di bidang Agribisnis	Terciptanya kesempatan kerja di sektor agribisnis	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor agribisnis

Dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal terutama Melalui Bidang Agribisnis Yang Berwawasan Lingkungan maka strategi yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 1

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan profesional	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas birokrasi	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian
2.	Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis, lembaga keuangan pertanian	Meningkatnya produksi pertanian	Meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian
		Terciptanya kesempatan kerja di sektor agribisnis	Meningkatkan kesempatan kerja di sektor agribisnis

Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) enam tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 terdapat enam prioritas pembangunan yaitu:

1. Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Agribisnis;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;

3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha;
4. Peningkatkan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda Dan Olahraga;
6. Peningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat.

Berdasarkan prioritas diatas yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pertanian dijelaskan dengan uraian berikut :

### **1. Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis**

Dalam kehidupan manusia terdapat tiga utama kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan untuk dapat beraktifitas. Kabupaten Sukabumi merupakan daratan dengan aneka sumber daya yang berpotensi tinggi, lahan - lahan potensial dalam

bidang pertanian sebagai bahan pokok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menyikapi isu/permasalahan di masa depan tentang kurangnya ketersediaan bahan pokok pangan, Kabupaten Sukabumi harus mulai mewaspadaai dan menyiasati ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang krusial karena hal ini akan memberi dampak pada sektor-sektor yang sedang berjalan.

Ketahanan pangan menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan adanya hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Peran aktif pemerintah dan masyarakat khususnya Kabupaten Sukabumi sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan secara sinergi. Sehingga dengan memiliki ketahanan pangan, daerah akan memiliki ketersediaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

### **2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

Pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dimaksudkan untuk penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam/agraria secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam pengontrolan dan pengelolaan pemerintah berdasarkan asas kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal hendaknya memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu upaya dalam menyiasati strategi ini yakni dengan mengupayakan pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal daerah. Melalui pengembangan ekonomi lokal daerah, maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertanggung perekonomian daerah.

Pengembangan agribisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai industri berbasis sumber daya. Agribisnis berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja (khususnya pada Kabupaten Sukabumi) yang mempunyai potensi dalam mengkolaborasikan sentra pertanian dengan sentra bisnis. Pengembangan agribisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek.

### **3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha**

Pekerjaan merupakan aktifitas manusia yang menghasilkan sesuatu baik barang ataupun berupa uang. Barang dan uang yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik apabila manusia mempunyai pekerjaan, agar dihasilkan sesuatu sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Diperlukan campur tangan dan upaya

pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Kondisi daerah yang kondusif merupakan prasyarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. Selain kondisi daerah yang memadai, SDM daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing manusia di Kabupaten Sukabumi dan peningkatan infrastruktur daerah merupakan modal dasar dalam upaya penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM yang berkualitas, sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan dan perluasan kesempatan kerja merupakan *impact* dari peningkatan SDM dan infrastruktur.

#### **4. Peningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan merupakan kata yang cukup kompleks, karena ia mengandung beberapa unsur untuk dapat mencapai sejahtera. Sejahtera dapat dikatakan sebagai “bahagia dan berkecukupan dalam segala hal”, dan segala aspek kehidupan manusia berpengaruh dalam mencapai sejahtera. Peningkatan kemampuan daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan perlu melakukan efektifitas kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dengan adanya pengefektifan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, diharapkan terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, ketepatan sasaran penerima bantuan dan perlindungan sosial perlu diperhatikan agar pengentasan kemiskinan berdampak efektif dan efisien dalam mengurangi beban masyarakat.

Upaya memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin memiliki kesempatan keluar dari garis kemiskinan dan terus menjaga perekonomiannya agar tidak kembali ke dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini sangat diperlukan karena upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memiliki dampak panjang dalam kestabilan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan melakukan strategi pemberdayaan, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan segala potensi SDM maupun SDA di masing-masing wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu melakukan upaya berupa meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar dapat mendayagunakan segala potensi dengan tepat untuk pencapaian pembangunan daerah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta peningkatan kualitas udara dan perairan perlu dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan berkualitas perlu didukung oleh upaya penegakan hukum lingkungan secara efektif dan adil sehingga keseimbangan antara integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Sinergi antara peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian. Perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko berupa dampak perubahan ekosistem baik secara negatif maupun positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Secara nyata, hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan Pembangunan Pertanian selaras dengan arah kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi periode 2016 sampai 2021. Pada Tahun pertama (2016) arah kebijakannya adalah “Mewujudkan Pembangunan Kab Sukabumi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas, kemandirian dan daya saing”, Tahun kedua (2017) adalah Peningkatan Kualitas Daya saing SDM dengan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai, Tahun Ketiga (2019) adalah Penguatan Perekonomian lokal yang kondusif dengan didukung oleh Pemerataan Pembangunan Wilayah, Tahun Keempat (2020) adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui penurunan kesenjangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Tahun Kelima (2020) adalah Penguatan reformasi birokrasi pada seluruh aspek pembangunan dan pada tahun terakhir (2021) arah kebijakannya adalah Pemantapan Kemandirian masyarakat pada aspek sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial.

### **5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian**

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2021 untuk diarahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi kabupaten Sukabumi. Program

adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pertanian Tahun 2021 berisi program dan kegiatan yang prioritas, baik untuk mencapai secara langsung tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pertanian Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian yang telah disusun kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Sukabumi (pagu indikatif), selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2021. Kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Dinas Pertanian Tahun 2021 dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp)
----	----------------------	---------------------------------

No	Program dan Kegiatan	Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp)
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>30.062.040.654</b>
A.	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>96.477.700</b>
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	20.027.000
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	10.620.000
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	10.562.500
4.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	11.395.000
5.	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	11.312.500
6.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.930.000
7.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	18.630.000
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.843.706.069
9.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.241.500
10.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	6.452.500
11.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.686.885
12.	Penyediaan bahan logistic	134.549.300
13.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.844.600
14.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	107.598.500
15.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	62.892.500
16.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	654.000.000
17.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.865.687.600
18.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peroraan dinas atau kendaraan jabatan	306.370.000
19.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	24.500.000
II.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>31.364.185.450</b>
A.	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>1.365.842.900</b>
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	250.000.000

No	Program dan Kegiatan	Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp)
2.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1.115.842.900
III.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>31.364.185.450</b>
A.	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>3.824.253.700</b>
1.	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	200.000.000
2.	Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	75.000.000
3.	Koordinas dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	3.549.253.600
B.	<b>Pembangunan Sarana Pertanian</b>	<b>27.539.931.750</b>
1.	Pembangunan, Rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	14.484.647.000
2.	Pembangunan, Rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani	4.971.516.750
3.	Pembangunan DAM Parit	1.993.768.000
4.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya (DAK Fisik)	5.090.000.000
IV.	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>200.000.000</b>
A.	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>200.000.000</b>
1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	200.000.000
V.	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>2.163.750.000</b>
A.	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>2.163.750.000</b>
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2.163.750.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>65.219.091.504</b>

Strategi dalam pencapaian output dan outcome maka Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2021 akan melaksanakan 5 (lima) program yaitu 1). Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, 2). Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, 3). Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, 4). Program perijinan usaha pertanian dan 5). program penyuluhan. Kelima program tersebut akan didukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah sebanyak

19 kegiatan. Output untuk masing-masing indikator program, tolok ukur, sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan tolok ukur kegiatan, terlampir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2021 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Palabuhanratu, Januari 2021

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Sukabumi,



**Ir. H. SUDRAJAT, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620422 198803 1 006

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**TABEL KERJA RENJA TAHUN 2021**  
**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN PERMEND AGRI 90	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM PERMEND AGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
PERTANIAN	Tanaman Pangan dan Hortikultura	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Peningkatan Produksi Padi, jagung, kedelai dan ubikayu	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (Ton) : - Padi Sawah - Padi Gogo - Jagung - Kedelai - Ubi Kayu	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Penggunaan Sarana Pertanian berupa Benih Unggul tanaman pangan	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02
PERTANIAN	Tanaman Pangan dan Hortikultura	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Optimalisasi Balai benih Induk Padi Sawah	Tersedianya benih unggul Padi bersertifikat	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi	Produksi benih bersertifikat	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produksi Sarana berupa Benih Tanaman Pangan yang unggul berlabel	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02

					dan Spesifik Lokasi					nan							
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Pengembangan Infrastruktur Pertanian	Jaringan irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Infrastruktur Pertanian berupa Jaringan irigasi, Embung, Jalan Usaha Tani dan Dam Parit	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	03	2.02	01
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>		Embung Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Embung Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian			Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	03	2.02	02	
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>		Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani	Pembangunan Prasarana Pertanian			Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	03	2.02	03	
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>		DAM Parit	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DAM Parit	Pembangunan Prasarana Pertanian			Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	03	2.02	04	

PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Peningkatan Produksi melalui Prasarana dan Sarana Pertanian	Fasilitasi Alsintan dan Pupuk	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Penggunaan PUPUK Bersubsidi	Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Penggunaan Sarana Pertanian berupa pupuk bersubsidi dan alsintan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	02	2.01	01
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penggunaan Sarana Alsintan	Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian				Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02
PERTANIAN		<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Optimalisasi Kebun Dinas	Pengelolaan Kebun Dinas	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Lahan Kebun dinas di 6 lokasi	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pengelolaan Lahan Kebun Dinas	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan		PERTANIAN	3	27	03	2.02	01

PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pemetaan LP2B, Sosialisasi dan Monitoring	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Pemetaan LP2B	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peta LP2B	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	03	2.02	02
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)	Perberdayaan kelompok P3A	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pemberdayaan Petani P3A Mitra Cai	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pengelolaan Prasarana Pemanfaatan Air Irigasi	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	03	2.02	03
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP Pendamping)	Pemberdayaan kelompok P3A	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pemberdayaan Petani P3A Mitra Cai	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pengelolaan Prasarana Pemanfaatan Air Irigasi	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	03	2.02	03

PERTANIAN	Perkebunan	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Kemitraan Usaha melalui optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan	Produksi pangan pada lahan perkebunan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Perkebunan Rakyat	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Kemitraan Usaha Pemanfaatan Lahan Perkebunan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terciptanya kesempatan kerja sektor agribisnis	Perkebunan	PERTANIAN	3	27	06	2.01	03
PERTANIAN	Perkebunan	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Intensifikasi Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	Intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi tanaman karet, the, kelapa, cengkeh, kopi, aren, pala dan kakao	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penggunaan Bibit Komoditi perkebunan dan Pupuk	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Penggunaan sarana pertanian berupa bibit perkebunan dan pupuk	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Perkebunan	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02
PERTANIAN	Perkebunan	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar	Perkebunan Besar	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pembinaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN)	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten /Kota	PBS dan PTPN berkinerja baik	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terciptanya kesempatan kerja sektor agribisnis	Perkebunan	PERTANIAN	3	27	06	2.01	03

PERTANIAN	Perkebunan	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan	Benih tanaman perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Penggunaan Bibit Komoditi Perkebunan bersertifikat	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Penggunaan sarana pertanian berupa Bibit Unggul Perkebunan	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	Perkebunan	PERTANIAN	3	27	03	2.01	02
PERTANIAN	Perkebunan	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Perlindungan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Pengendalian OPT perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT Komoditi Perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota	Penurunan serangan OPT Tanaman Perkebunan	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGUL ANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	Perkebunan	PERTANIAN	3	27	05	2.01	02
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>	Pengolahan Data Statistik Pertanian	Data tanam, panen , produksi dan provitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Data tanam, panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Penyediaan Data Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	03	2.01	03

PERTANIAN	Tanaman Pangan dan Hortikultura	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olah Padi, Palawija dan Hortikultura	Fasilitasi alat pasca panen dan alat pengolahan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelompok Usaha tanaman pangan dan hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Penggunaan sarana pertanian berupa alat pasca panen dan alat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02
PERTANIAN	Tanaman Pangan dan Hortikultura	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian	fasilitasi pameran dan promosi hasil pertanian	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kelompok Usaha Komoditi tanaman Pangan dan Hortikultura	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Kelompok Usaha Komoditi tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Tanaman Pangan dan Hortikultura	PERTANIAN	3	27	06	2.01	03
PERTANIAN	Tanaman Pangan dan Hortikultura	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Pengembangan Kawasan Buah-Buahan	Kawasan Buah-buahan	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian	Kawasan Buah Buahan ( manggis. Pisang , Durian, Alpukat)	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Kawasan Hortikultura	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan	Tanaman Pangan dan Hortikultura	PERTANIAN	3	27	03	2.01	01



					Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B													
PERTANIAN	Tanaman Pangan dan Hortikultura	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Pengembangan Kawasan Florikultura	Kawasan florikultura	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kawasan Florikultura ( Dracaena , Krisan)	Pengembangan Prasarana Pertanian		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi Tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura	PERTANIAN	3	27	03	2.01	01	
PERTANIAN	Perkebunan	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Penguatan Kompetensi Manajemen Kelembagaan dan Aksesibilitas Permodalan Usaha	Penguatan kelembagaan dan permodalan kelompok	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kelompok Usaha Komoditi Perkebunan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Kelompok Usaha Komoditi Perkebunan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terciptanya kesempatan kerja sektor agribisnis	Perkebunan	PERTANIAN	3	27	06	2.01	02	

			Perkebunan															
PERTANIAN	Perkebunan	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Perkebunan	alat pengolahan dan pasca panen dan fasilitasi pameran dan promosi	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kelompok Usaha Komoditi Perkebunan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten /Kota	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terciptanya kesempatan kerja sektor agribisnis	Perkebunan	PERTANIAN	3	27	06	2.01	03		
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelompok Usaha tanaman perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Pembinaan dan fasilitasi kelompok/gapoktan di 386 desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rembug KTNA, Kegiatan penyuluh tingkat kabupaten, propinsi dan Nasional	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas kelembagaan petani	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	

PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Pelayanan Penyuluhan Pertanian	Penerapan teknologi tepat guna di 386 desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembinaan Kelembagaan Petani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas kelembagaan tani	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Pengelolaan Ketenagaaan Penyuluh (PKP)	Pembinaan dan pengelolaan tenaga penyuluh PNS, dan Non PNS ( THL Propinsi dan THL Pusat)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pembinaan, penilaian dan pengawasan kinerja penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas kelembagaan tani	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Pengelolaan Tenaga Penyuluh (THL-TBPP)	Honorarium /insentif THL-TBPP	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pembinaan, penilaian dan pengawasan kinerja penyuluh THL-TBPP	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas kelembagaan tani	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01
PERTANIAN	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhd es)	Pengadaan sistem Jarkomluhd es	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan sarana penyuluhan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Sarana dan Prasarana penyuluhan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas kelembagaan tani	Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pertanian	PERTANIAN	3	27	07	2.01	03

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Urusa n Pertan ian	Prog ram	Kegia tan	Sub kegia tan
-----------------------------	-------------	--------------	---------------------

### Matrik Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Tahun 2021

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TOLOK UKUR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TOLOK UKUR	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN
02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian	2%	2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian	1.167.667 Ton	01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	250.000.000	Jumlah bibit cengekeh	7.440 pohon
								Jumlah Bibit kelapa	4.950 Pohon
								Jumlah pupuk organik	18.600 kg

					Pengadaan hand spayer	7 buah	
					Jumlah peserta pelatihan peremajaan cengkeh	30 orang	
					Jumlah peserta pelatihan peremajaan	30 orang	
				02. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.115.842.900	Bahan kimia	11 jenis
					Bibit padi inbrida	10.125 kg	
					Cetak label benih pertanian	1000 lembar	
					Pengadaa alat pengolahan gula aren	1 paket	
					Pengadaan traktor	6 unit	
					Pengadaan cultivator	1 unit	
					Pengadaan hand spayer	49 buah	
					Pengadaan mesin babat rumput	4 unit	



							Intensifikasi tanaman cengkeh	40 Ha			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN					05. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	7.107.881.0 00	Jumlah irigasi tanah dangkal yang dibangun	30 Unit			
							2.01.Pengem bangan Prasarana Pertanian	01. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	200.000.00 0	Pupuk organik	15.000 kg
										Bibit Jahe gajah	500 kg
										Bibit alpukat	100 batang
										Bibit bawang merah	1000 kg
										Plot plastik	150 buah
	Peserta rapat koordinasi evaluasi kegiatan hortikultura	60 orang									

--	--	--	--	--	--

Pesertya rapat koordinasi pengembangan kawasan hortikultura	50 orang
Benih bawang merah	4000 kg
Pengembangan buah dirian	100 ha
Pengembangan buah manggis	100 ha
Pengembangan buah pisang	100 ha
Pengembangan buah sawo	50 ha
Pengembangan cabe besar	50 Ha
Pengembangan cabe rawit	50 Ha
Pengembangan jahe	50 Ha
Pengembangan cabe besar	50 Ha
Pengembangan cabe rawit	50 Ha

		Pengembangan jahe	50 Ha
		Pengembangan sayuran daun lainnya	50 Ha
		Pengembangan gerakan tanam /panen hortikultura	100 orang
		Peserta sosialis gerakan cinta bunga	100 orang
		Pengembangan kawasan sayuran	1 Ha
		Pengembangan kawasan buah-buahan	1 Ha
		Dukungan kegiatan P2WKSS 10 program PKK, loma posyandu, kesatuan gerak PKK-KB kesehatan	1 paket
02. Penyusunan Peta Lahan Pangan Berkelanjutan/LP2B	75.000.000	Jumlah peserta diseminasi LP2B tingkat kabupaten	75 orang
		Pemetaan lahan sawah yang ditetapkan dalam LP2B	6.000 Ha
		Jumlah peserta diseminasi perpres no. 59 tahun 2019 di 47 kecamatan	47 Kali

					03. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	3.549.253.600	Pengadaan hand spayer	7 unit
							Jumlah peserta diseminasi penyusunan sasaran tanam	100 orang
							Jumlah peserta pelatihan (IPDMIP)	56 orang
							Jumlah peserta refreshing data SP tanaman pangan dan hortikultura	100 orang
							Jumlah peserta sinkronisasi data SP tingkat kabupaten	100 orang
							Jumlah peserta sinkronisasi data SP wil I-VII	141 orang
							Kunjungan dan pelatihan lainnya	14 poktan
							Mekanisasi (IPDMIP)	14 poktan
							Penghargaan (IPDMIP)	14 poktan
							Peralatan pendukung manajemen (IPDMIP)	1 paket
							Pertemuan review penyuluhan bulanan (IPDMIP)	11 bulan

I						Rekrutmren staf lapang (tenaga penyuluh kontrak ) (IPDMIP)	14 orang	
						Sekolah lapang (IPDMIP)	84 poktan	
						Peserta forum berbagi pengalaman antar petani	420 orang	
						Peseta kunjungan antar desa	420 orang	
						Peseta pelatihan ketua poktan menjadi penyuluh swadaya	60 orang	
						Pesrta pertemuan reuiu bulanan penyuluh	470 orang	
						SL-Padi	35.280 orang	
						Tenaga penyuluh pendamping IPDMIP	14 orang	
						Peralatan pendukung IPDMIP	3 jenis	
					<b>27.539.931.750</b>			
					Pembangunan,Rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	15.484.647.000	Jumlah Pembangunan,Rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	116 paket

						Pembangunan, Rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani	4.971.516.750	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani	22 unit
						Pembangunan DAM Parit	1.993.768.000	Jumlah Pembangunan DAM Parit	9 paket
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (DAK Fisik)	5.090.000.000	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irdam)	10 Unit
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (DAK Fisik)		Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	7 Unit
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (DAK Fisik)		Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	5 Unit
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (DAK Fisik)		Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2 Km
06. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor agribisnis	2%	2.01. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja sektor agribisnis	142.414 Orang	02. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	200.000.000	Bimbingan teknis pembekalan bagi pencacah	35 Orang



							Pengadaan aplikasi e statistik perkebunan di Kabupaten Sukabumi	1 paket	
							Sarana penunjang agrowisata 5 perkebunan besar	5 paket	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	2.163.750.000	Jumlah peserta pendampingan program YESS	50 orang
							Jumlah peserta sosialisasi kegiatan DAK non Fisik TA. 2021	110 orang	
							Jumlah peserta Rakor penyuluhan	300 orang	
							Jumlah peserta rapat koordinasi lingkup UPTD penyuluh pertanian	110 orang	
							Jumlah peserta rapat penandatanganan kontrak THL penyuluh	110 orang	
							Jumlah peserta rempug KTNA	210 orang	
							Jumlah peserta rempug utama KTNA	150 orang	

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Pengelolaan Laporan perangkat daerah	100 %	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	39 Dokumen	01. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	20.027.500	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (renstra, renja dan RKPD)	5 dokumen
						02. Koodinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKD	10.620.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
						03. Koodinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKD	10.562.500	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
						04. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	11.395.000	Jumlah dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen
						05. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	11.312.500	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen
						6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.930.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LPPD,LKPJ,LKj dan RUP)	4 dokumen
						7. Evaluasi kinerja perangkat daerah	18.630.000	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan
	Cakupan Administrasi perkantoran	100 %	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.843.706.069	Jumlah pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	173 Orang

			n Perangka t Daerah					
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.241.500	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	6.452.500	Jumlah dokumen laporan bulanan dan dokumen laporan triwulan evaluasi renja	12 laporan dan 4 laporan
Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.686.885	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat listrik 3 jenis, handsanitizer 10 botol dan sabun cuci tangan 30 buah
					Penyediaan bahan logistic	134.549.300	Jumlah Penyediaan bahan logistic	12 bulan
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.844.600	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	107.598.500	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	12 bulan

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	62.892.500	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	AC 4 unit, Laptop 2 unit, printer 3 unit dan kursi sofa 2 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	654.000.000	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.865.687.600	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	306.370.000	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	12 bulan

				ah Daerah					
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	24.500.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan